

Peran Tenaga Pendamping Masyarakat Terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep

Oleh:

Ferawati, Moh. Said*, Alqaf Harto Maryono*.

e-mail : rakaflly@gmail.com

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi Peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah sebagai bentuk salah satu mekanisme dalam program tersebut yang mempunyai tugas untuk mendampingi masyarakat mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu melakukan pendampingan dengan membentuka rekening di Bank BRI Sumenep yang ditunjuk oleh pihak PU. Cipta karya dan tata usaha Sumenep, kemudian selain itu Tenaga Pendamping Masyarakat juga melakukan mencairkan dana kepada masyarakat yang mendapat bantuan tersebut. Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan tugas dan perannya dalam Program Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 memiliki kendala di masyarakat yakni masyarakat masih memiliki paradigma yang masih tradisional dalam pembangunan tersebut sehingga peneliti ingin meneliti peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep tahun 2014

Hasil penelitian ini, dideskripsikan melalui berbagai informasi dan data temuan di lapangan selama penelitian, mengenai Peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya yang dilihat dari Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013 sudah baik. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip-perinsip peran pendamping yakni Tenaga Pendamping Masyarakat sudah bersikap sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan mediator dengan memberikan pengarahan serta motivasi, namun hal pelaporan Tenaga Pendamping Masyarakat agak sedikit terlambat dikarenakan cara pandang masyarakat yang masih tradisional, dalam pembangunan masih menggunakan hari baik tanpa memperhatikan deadline penyelesaian program pembangunan tersebut

Kata kunci : *Prestasi Kerja, Kenaikan Pangkat dan Promosi Jabatan*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan kegiatan untuk memperbaiki sesuatu yang kurang untuk lebih sempurna atau lebih baik. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan sebuah rencana bertahap dari proses penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan dimana proses tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sesuai dengan amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN)

Pada penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, melalui suatu forum yang disebut sebagai Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Musrenbang dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi antar rancangan Rencana Kerja Satuan Perangkat daerah (Renja SKPD) dan Usulan Usulan Pendanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengupayakan pencapaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2013.

Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) merupakan salah satu program Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) dalam rangka pelayanan kepada masyarakat berpenghasilan rendah berupa bantuan stimulan pembangunan baru serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan

prasarana sarana umum (PSU). Besarnya bantuan stimulan yang diberikan adalah 50 % dari besar dana untuk meningkatkan kualitas rumah swadaya yang ditetapkan Menteri. (permenpera No 14 Tahun 2011)

Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya kepada penerima bantuan akan dilakukan melalui bank yang telah ditunjuk sebelumnya sebagai mitra kerja. Bank penyalur akan menerbitkan buku tabungan atas nama penerima bantuan dan penerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilarang memberi kuasa penarikan tabungan kepada pihak lain. Sementara itu bank penyalur dilarang melayani apabila ada penarikan tabungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan surat kuasa. Hal ini

Tahap awal pengajuan bantuan stimulan perumahan swadaya dengan mengajukan proposal. Setelah dilakukan proses verifikasi administrasi, kemudian direkomendasikan untuk dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan ini dilakukan oleh tim verifikasi lapangan tingkat kabupaten yang terdiri dari SKPD yang menangani bidang perumahan (Bappeda dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang), Ketua Badan Keswadayaan Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat. Hasilnya pengajuan dinyatakan lolos verifikasi lapangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah beserta segala kelengkapan pencairannya diserahkan kepada pihak Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) untuk dilakukan uji kelayakan dari kelengkapan proposal.

Saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang telah mengajukan permohonan pencairan dana atas nama penerima dana BSPS kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan proses penerbitan buku tabungan sedang dilakukan.

Berbicara terkait dengan fungsi Tenaga Pendamping Masyarakat dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya adalah sebagai bentuk salah satu mekanisme dalam program tersebut yang mempunyai tugas untuk mendampingi masyarakat mendapatkan bantuan bantuan stimulan perumahan swadaya, yaitu melakukan pendampingan dengan membentuka rekening di Bank BRI Sumenep yang ditunjuk oleh pihak PU. Cipta karya dan tata usaha Sumenep, kemudian selain itu Tenaga Pendamping Masyarakat juga melakukan mencairkan dana kepada masyarakat yang mendapat bantuan tersebut. Tenaga Pendamping Masyarakat melaksanakan tugas dan perannya dalam Program Perumahan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 memiliki kendala di masyarakat yakni masyarakat masih memiliki paradigma yang masih tradisional dalam pembangunan tersebut sehingga peneliti ingin meneliti peran Tenaga Pendamping Masyarakat terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep tahun 2014

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran (Soeharto 2002).

Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks: melibatkan banyak aktor dengan berbagai kepentingan mereka masing-masing. Kerumitan bisa bertambah ketika kebijakan yang diimplementasikan tidak dirumuskan secara jelas sebagai akibat kompromi-kompromi politik yang mewarnai proses perumusan kebijakan tersebut.

Implementasi Kebijakan

implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di

tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam Wibawa (1994,37) implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Islamy (1997,102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- 1) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.
- 2) Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Langkah-Langkah Implementasi Kebijakan

Menurut Soenarko (2005,187) untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan Kebijakan dan program ada 3 kegiatan pokok yang penting, yaitu :

1) *Interpretation*

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, *interpretation* adalah berusaha untuk mengerti apa yang dimaksudkan oleh pembentuk kebijaksanaan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan. Program pelaksanaan yaitu rencana yang didukung dengan pendanaan yang siap untuk diterapkan, haruslah sesuai dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijaksanaan.

2) *Organization*

Organization dalam pelaksanaan kebijaksanaan dimaksudkan sebagai pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode –metode yang yang diperlukan menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijaksanaan itu.

3) *Application*

Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk terrealisirnya tujuan kebijaksanaan itu. Bentuk dari *application* ini yaitu *Programmed implementation* dan *adapted implementation*.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Hogwood dan Lewis dalam Wahab (1997,71-780 yaitu :

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan kecil.
- 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Sunggono (1994,149-153) implementasi kebijakan

mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

- 1) Isi kebijakan
- 2) Informasi
Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
- 3) Dukungan.
Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- 4) Pembagian potensi.
Sebab-musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

2.13.1 Pengertian dan Tujuan BPS

Bantuan Stimulan adalah fasilitas Pemerintah berupa sejumlah dana yang diberikan kepada MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) penerima manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan pembangunan perumahan swadaya (Permenpera No 14 Tahun 2011)

Tujuan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara

swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dan lingkungan yang sehat dan aman. (Permenpera No 06 Tahun 2013)

Konsep Pengadaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Dalam Panudju (1999:32), Secara garis besar pengadaan perumahan bagi MBR sangat dipengaruhi oleh dua aspek. Pertama, aspek kebijaksanaan, menyangkut pembuatan kebijaksanaan pemerintah, undang-undang, peraturan, kelembagaan dan program pemerintah di bidang perumahan. Kedua, aspek pelaksanaan atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mikro, menyangkut organisasi pelaksanaan, dana, pengadaan lahan matang atau kapling siap bangun dan pelaksanaan pembangunan perumahannya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan masalah atau hal-hal yang menjadi pusat perhatian dan akan mengungkapkan fakta yang ada melalui data yang akan dikumpulkan, diolah, dianalisis dalam penelitian ini. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Peran Tenaga Pendamping Masyarakat terhadap Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep, Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping Masyarakat atau yang disebut lain TPM

Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitiannya yaitu di Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Usaha Kabupaten Sumenep dan Desa Ambunten Tengah Kec.Ambunten. Lokasi ini dipilih dengan alasan bahwa kantor di Dinas PU. Cipta Karya dan Tata Usaha merupakan instansi yang menyelenggarakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep.

Sumber Data

Hasan (2002:82) menyatakan berdasarkan sumber pengambilannya, Data dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan

memerlukannya.Data primer ini, disebut data asli dan data baru. Dalam hal ini data tersebut adalah Kepala Bidang Perumahan, staf Bidang Perumahan PU Cipta Karya ,tim Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Kepala Desa Ambunten Tengah dan beberapa masyarakat yang mendapatkan bantuan program BSPS di Kabupaten Sumenep.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan peneliti terdahulu .data sekunder

disebut data tersedia dilokasi penelitian.

3.1 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian untuk mengukur yang akan diteliti maka diperlukan instrumen penelitian agar nantinya pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap sistematis sehingga lebih mudah diolah (Suharsini 1996 dalam Hasan (2002:76) dalam penelitian kualitatif instrumen utama adalah peneliti sendiri, Sedangkan instrumen penunjangnya adalah :

1. Pedoman wawancara yang berisi poin-poin yang menjadi acuan dalam melakukan wawancara.
2. Alat-alat Bantu Lain
Yaitu alat-alat bantu yang berupa alat tulis menulis yang peneliti gunakan terutama untuk mencatat hasil-hasil observasi dan hasil-hasil wawancara.

Subyek Penelitian

Satori dan Komariah 2011 : 48 mengemukakan bahwa subyek penelitian merupakan sebagai informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai PU Cipta Karya, Tenaga pendamping Masyarakat, serta Masyarakat Penerima Bantuan

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang tepat, dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya.. Iqbal (2002:83) menyatakan bahwa pengumpulan data dilakukan sebagai berikut :

1. Wawancara Yaitu wawancara yang berisi poin-poin yang menjadi dasar acuan dalam melakukan wawancara
2. Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan dan Pengamatan serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme itu, sesuai dengan tujuan empiris.
3. Studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen atau catatan penting.

Teknik Analisa Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2004: 334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Dalam penelitian kualitatif, langkah kedua setelah mereduksi data yaitu penyajian data. Dalam hal ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. dengan teks yang bersifat naratif.
3. *Verification* (Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan-kesimpulan awal yang ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi/gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Keadaan Geografi Kabupaten Sumenep

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu bagian dari Propinsi Jawa Timur, terletak pada posisi 113°32'54'' Bujur Timur dan 4°55' LS-7°24' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Laut Jawa

- b. Sebelah Selatan : Selat Madura
- c. Sebelah Timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Pamekasan.

Geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi menjadi dua bagian yaitu wilayah daratan dan kepulauan. Bagian Dataran luasnya 1.146,93 Km² atau sekitar 54,79 %. Sedangkan wilayah Kepulauan luasnya 946,53 Km² atau sekitar 45,21 %.

Wilayah kepulauan meliputi 126 pulau. Sebagaimana wilayah Pulau Madura pada umumnya, merupakan wilayah kering dan pegunungan, Kabupaten Sumenep bagian utara mulai Kecamatan Pasongsongan, Ambunten, Dasuk dan Batuputih sebagian besar terdiri dari lahan kering. Temperatur di Kabupaten Sumenep rata-rata 24,7°C – 32,9°C.

Topografi Daerah Kabupaten Sumenep

Secara topografis Kabupaten Sumenep merupakan wilayah kepulauan, yaitu terdiri dari 126 pulau, terdiri atas 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni, serta 104 pulau bernama dan 22 pulau belum diberi nama. Kondisi tersebut, telah memperkaya sumber daya alam, baik yang terdapat di darat, laut dan udara, dalam bentuk keanekaragaman flora, fauna, sumber daya mineral, dan sumber daya air yang diharapkan dapat didayagunakan secara optimal, bertanggung jawab dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kab. Sumenep Tahun 2014

Kemiskinan merupakan masalah bagi bangsa kita ini semakin tahun tingkat kemiskinan di Negara kita ini semakin meningkat, banyak program-program Pemerintah yang dikucurkan untuk masyarakat, baik Program Nasional Pemberantasan Kemiskinan Mandiri Pedesaan, Program Nasional Pemberantasan Kemiskinan Mandiri Perkotaan, Bantuan Raskin, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah yang merupakan Program dari Kementerian Perumahan Rakyat.

Kabupaten Sumenep sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan program kemiskinan salah satunya yakni program pembangunan perumahan rakyat yang sumber dayanya dari Kementerian Perumahan Rakyat. Yang sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2012. Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disebut dengan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) merupakan Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi serta dokumen yang ada, tentang peran Tenaga Pendamping Masyarakat dalam Program Nasional Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun 2014 yang dilakukan dengan wawancara ke tiga informan yakni informan kunci, informan utama dan informan pendukung yang dilakukan di Dinas Cipta Karya Kab Sumenep serta ke Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kab Sumenep sehingga data yang diperoleh obyektif, mengacu pada tugas Tenaga Pendamping Masyarakat yang diatur dalam Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping Masyarakat atau yang disebut lain TPM wajib melaksanakan tugas, diantaranya :

1. Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan
Tenaga Pendamping Masyarakat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dengan tahapan awal yakni Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan.

Berikut ini wawancara dengan salah satu Tenaga Pendamping Masyarakat yang menangani bantuan stimulan perumahan swadaya

“dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya tersebut tenaga pendamping masyarakat memberikan bimbingan teknis kepada kelompok penerima bantuan baik dalam melakukan pembelian bahan bangunan seperti harga bahan bangunan dan dimana toko yang sudah ditunjuk oleh kemenpera dalam melakukan pembelian tersebut dan pelaksanaan bangunan yang baik efektif serta efisien namun demikian masyarakat langsung menyerahkan langsung proses pembelian bahan-bahan bangunan tersebut kepada kami, kendala yang kami hadapi dlapangan tentang pembangunan rumah tersebut, (Amin Arif Santoso, 23 Juli 2014)

2. Membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 % (tiga puluh persen), dan seratus persen.

Tenaga pendamping masyarakat selain Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan mereka juga mempunyai tugas untuk membuat pelaporan pekerjaan pembangunan rumah swadaya tersebut progres tersebut mulai dari rumah tersebut dalam kondisi awal 0 % , pembangunan tersebut sudah dilakukan 30 % serta sampai pembanguna rumah tersebut sampai selesai progres 100 %

Berikut ini wawancara dengan salah satu Tenaga Pendamping Masyarakat yang menangani bantuan stimulan perumahan swadaya

“kami selaku Tenaga Pendamping dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya melaporkan kondisi rumah Kelompok Penerima Bantuan mulai dari kondisi awal yakni kondisi rumah yang masih belum direhap, pekerjaan rumah tersebut yang sudah dilakukan 30% sampai selesai, dalam kegiatan tersebut kami selalu mendokumentasikan dengan kamera, penerima BSPS tersebut cenderung masih memiliki paradigma dalam pembuatan bangunan tersebut masih menunggu hari baik sehingga progres pembangunan tersebut terkendala, kurangnya tukang yang disebabkan oleh waktu pembangunan yang dilakukan secara bersa sama, serta bahan material yang sulit masuk ke lokasi dikarenakan lokasi tersebut jauh dari jalan raya (Amin Arif Santoso, 23 Juli 2014)

Analisa Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti ingin menganalisa hasil penelitian tersebut dengan teori-teori yang dirasa berhubungan penelitian di atas. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisa peran Tenaga Pendamping Masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilahat dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping Masyarakat atau yang disebut lain

Tenaga Pendamping Masyarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan, Membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 % (tiga puluh persen), dan seratus persen.

Pembahasan

Berdasarkan analisa hasil penelitian di atas, peneliti ingin menjelaskan tentang peran Tenaga Pendamping Masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilahat dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping Masyarakat atau yang disebut lain Tenaga Pendamping Masyarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti ingin menganalisa hasil penelitian tersebut dengan teori-teori yang dirasa berhubungan penelitian di atas. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisa peran Tenaga Pendamping Masyarakat terhadap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang dilihat dari Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, Tenaga Pendamping

Masyarakat atau yang disebut lain Tenaga Pendamping Masyarakat wajib melaksanakan tugas, diantaranya Memberikan bimbingan teknis kepada KPB dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan

Tenaga Pendamping Masyarakat sudah Memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan dalam melaksanakan pembelian bahan bangunan dan pelaksanaan bangunan pendampingan juga sudah baik, sudah sesuai dengan prinsip-prinsip peran pendamping yakni Tenaga Pendamping Masyarakat sudah bersikap sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan mediator dengan memberikan pengarahan serta motivasi yang berhubungan dengan pembelian bahan-bahan bangunan dengan tanpa mempersulitnya.

Membuat laporan progres pekerjaan mulai dari 0 % (nol persen), 30 % (tiga puluh persen), dan seratus persen.

Tenaga Pendamping Masyarakat sudah melakukan laporan tersebut dengan baik sesuai syarat-syarat penyusunan laporan yang baik, namun ada yang perlu diperbaiki dalam ketepatan waktu penyeteroran laporan, artinya penyampaian dan penerimaan laporan harus tepat pada waktunya. Laporan tersebut dalam ketepatan waktunya agak sedikit terlambat dikarenakan dalam pembangunan rumah swadaya tersebut kelompok Penerima Bantuan masih berpedoman pada paradigma (cara pandang) tradisional/lama yakni masih menggunakan prembon (masih mencari hari baik) pada awal pembangunan tersebut.

Dengan demikian Peran Pendamping Masyarakat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Sumenep yang menyangkut pemberian bimbingan teknis kepada dan pembuatan laporan sudah berjalan baik

Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran dan masukan kepada Tenaga Pendamping dalam melaksanakan tugas perannya sesuai dengan Permenpera Nomor 06 Pasal 15 ayat (2) Tahun 2013, yaitu:

Hendaknya Tenaga Pendamping Bisa memberikan masukan terhadap perubahan paradigma masyarakat yang masih tradisional dengan pendekatan persuatif tentang pembangunan rumah swadaya tersebut Meskipun paradigma tradisional itu dilakukan juga ,hendaknya penentuan awal pembangunan perumahan swadaya tersebut sesuai dengan jadwal dan ketentuan pembangunan dari Tenaga Pendamping Masyarakat. Dengan menanyakan kepada orang pintar agak lama sebelum dilakukan pembangunan tersebut. Sehingga pelaporan dari Tenaga Pendamping Masyarakat tidak telat atau sesuai dengan dealine waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Arimbi, Heriputri dan Santoso, Mas Achmad, 2003. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. WALHI, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ,2005, Jakarta : Balai Pustaka,
- Hakim, EM Lukman, 2009, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit ITS Press, Surabaya PMN dan Unija Press, Sumenep
- Hasan, Ikkal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, Ghalia Indonesia Jakarta
- Islamy, M, Irfan, (1997), *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Lemabaga Administrasi Negara, 2008, *Pengelolaan Informasi dan Teknik Pelaporan*, Jakarta, LAN.
- Moehariono, 2009, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Satori Djam'an., Komariah Aan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: bandung
- Soeharto, I. 2002. *Studi Kelayakan Proyek Industri*. Jakarta : Erlangga
- Sugiono, 2004, Metode Penelitian Administrasi, Edisi 11, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Toha, M. ,1997. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Ghalian Indonesia
- Nurhaida, H.S. 2003. "*Studi Implementasi Program Penataan Permukiman Kumuh di Kelurahan Mojosongo*". Tesis Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nurdin dan Usman, 2004, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Penerbit Bintang Pustaka, Yogyakarta
- Subarsono, AG. (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Soenarko, 2005, *Public Policy*, Penerbit Unair Press, Surabaya

Panudju, B. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota Dengan Peran Serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: PT. Alumni.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta

Wahab, Solichin A, 2004, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta

Wibawa, S, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik, teori dan proses*. Edisi revisi. Yogyakarta : Media Presindo

Peraturan Perundang-undangan

Permenpera (2013), Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Menteri Negara Perumahan Rakyat (*diakses WWW.djpp.depkumham.go.id tanggal 20 Pukul 21.00*)

Ahmad Rokhaul Alamin, *Jurnal Analitis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Jakarta Utara, 2010*. (*diakses [http](http://www.djpp.depkumham.go.id) Skripsi Analitis Peran Pendamping dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial Jakarta Utara tanggal 04 Pukul 15.00*)